

Implementasi Program Pelatihan Kerja dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam Mengatasi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Nganjuk

Ega Jelita Febriana¹, Muhammad Agus Muljanto²

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

egajelita2002@gmail.com¹, magusmuljanto@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to evaluate the implementation of the job training program funded by the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT) in reducing the unemployment rate in Nganjuk Regency. DBHCHT is a funding source derived from tobacco excise revenue, allocated to various development sectors in the regions, including the labor sector. Nganjuk Regency, as a DBHCHT beneficiary, has implemented several job training programs to enhance community skills, particularly for groups affected by tobacco excise regulations and those categorized as open unemployment. The method used in this research is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with representatives from the Department of Manpower, program trainers, and training participants, as well as field observations and related document analysis. The results of the study indicate that the DBHCHT job training program in Nganjuk Regency has had a positive impact on improving participants' work skills and readiness to enter the workforce. However, the implementation of this program still faces various challenges, including limited participant capacity, a mismatch between the training provided and the needs of the local job market, and the absence of an effective mentoring and job placement mechanism. Therefore, synergy between various sectors, more accurate identification of labor market needs, and the implementation of a continuous monitoring and evaluation system are required. These steps are expected to optimize the implementation of the DBHCHT job training program so that it can significantly contribute to reducing the unemployment rate in Nganjuk Regency.

Keywords: Implementation, Job Training Program, Unemployment.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan program pelatihan kerja yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran di Kabupaten Nganjuk. DBHCHT merupakan sumber pendanaan yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau, yang dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan di daerah, termasuk sektor ketenagakerjaan. Kabupaten Nganjuk sebagai penerima manfaat DBHCHT, telah melaksanakan sejumlah program pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi masyarakat, terutama bagi kelompok yang terdampak regulasi cukai tembakau dan yang berada dalam kategori pengangguran terbuka. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori David C. Korten untuk menganalisis pelaksanaan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan Dinas Tenaga Kerja, dan peserta pelatihan, ditambah dengan observasi lapangan dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan kerja DBHCHT di Kabupaten Nganjuk memberikan

dampak yang positif dalam meningkatkan keterampilan kerja dan kesiapan peserta untuk memasuki dunia kerja. Meski demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain peserta yang terbatas, jumlah kesesuaian antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, serta belum adanya pendampingan dan penyaluran tenaga kerja yang efektif, dan keterbatasan waktu pelatihan. Untuk itu, diperlukan sinergi antara berbagai sektor, identifikasi kebutuhan pasar kerja yang lebih akurat, serta penerapan sistem evaluasi dan pemantauan yang berkesinambungan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program pelatihan kerja DBHCHT sehingga mampu memberikan dampak signifikan dalam mengatasi tingkat pengangguran di Kabupaten Nganjuk.

Kata kunci: Implementasi, Program Pelatihan Kerja, Pengangguran.

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks dan multidimensional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana tingkat pertumbuhan ekonomi sering kali tidak sebanding dengan laju pertumbuhan angkatan kerja. Masalah pengangguran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi makro seperti rendahnya tingkat produktivitas, meningkatnya beban ketergantungan terhadap pemerintah, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan program yang mampu memberikan solusi jangka pendek maupun jangka panjang guna mengatasi permasalahan ini.

Menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat tersebut memiliki arti bahwa setiap warga Indonesia berhak untuk memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak. Namun pada kenyataannya, banyak jumlah tenaga kerja di Indonesia yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Namun pada kenyataannya jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 8,42 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2021 yang angkanya sebesar 9,1 juta orang.

Adanya masalah pengangguran ini tentunya berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap masalah lain seperti kemiskinan, kriminalitas dan persoalan – persoalan sosial politik yang semakin meningkat (Andrean et al., 2023). Pengangguran memunculkan banyak dampak negatif yang luas, baik bagi individu, keluarga, maupun bagi masyarakat luas. Bagi individu, pengangguran dapat menyebabkan penurunan pendapatan, meningkatnya kemiskinan dan menurunnya kualitas hidup. Bagi keluarga, pengangguran dapat menyebabkan ketegangan dan konflik, serta meningkatkan risiko putus sekolah bagi anak jika mereka sudah memiliki anak. Kemudian bagi masyarakat luas, pengangguran dapat menurunkan

produktivitas, meningkatnya kriminalitas dan meningkatnya ketidakstabilan sosial (Sabiq & Apsari, 2021).

Permasalahan pengangguran ini tidak hanya terjadi ditingkat nasional saja, namun masalah juga terjadi pada tingkat daerah kabupaten/kota. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki angka pengangguran cukup tinggi adalah Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Provinsi Jawa Timur dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi sebagaimana penulis tampilkan pada tabel di bawah ini;

Tabel 1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2024

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Tahun	Persentase jumlah penduduk (%)
1	2019	3,16
2	2020	4,80
3	2021	4,98
4	2022	4,74
5	2023	4,60
6	2024	4,40

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa angka pengangguran terbuka di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Di tahun 2020 sendiri terjadi kenaikan yang cukup pesat yaitu sebanyak 1,64 persen, dari semula 3,16 meningkat menjadi 4,80. Di tahun 2021 tren peningkatan pengangguran ini juga masih terjadi dengan kenaikan sebesar 0,86% menjadi 4,98 persen di tahun 2021. Selanjutnya di tahun 2022 penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nganjuk mulai terjadi dengan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,74 persen. Hanya saja tren penurunan tingkat pengangguran terbuka ini tidak sepesat kenaikan saat terjadi kenaikan di tahun 2020.

Kabupaten Nganjuk, sebagai salah satu daerah penerima DBHCHT, menghadapi tantangan besar dalam mengelola dana ini untuk mencapai tujuan strategis pemerintah, khususnya dalam menurunkan angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Nganjuk menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama akibat dinamika ekonomi lokal yang dipengaruhi oleh sektor pertanian, industri kecil, dan perdagangan. Dalam hal ini, DBHCHT memberikan peluang strategis untuk mendukung pengembangan program pelatihan kerja yang bertujuan

meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis masyarakat, sehingga mereka dapat lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan di pasar kerja.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yaitu dana yang dialokasikan berdasarkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Dana ini dirancang untuk mendukung berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Alokasi DBHCHT untuk sektor ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mengatasi dampak negatif kebijakan cukai terhadap kelompok masyarakat tertentu, seperti buruh tani tembakau dan pekerja pabrik rokok yang kehilangan pekerjaan akibat meningkatnya tarif cukai.

Program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menggunakan DBHCHT mencakup berbagai bidang, mulai dari pelatihan keterampilan teknis seperti menjahit, pengelasan, dan perbengkelan, hingga pelatihan keterampilan kewirausahaan seperti pengelolaan usaha kecil dan menengah. Program ini tidak hanya menargetkan individu yang menganggur tetapi juga kelompok rentan lainnya, seperti buruh tani tembakau yang terdampak oleh kebijakan cukai, perempuan kepala keluarga, dan generasi muda yang baru memasuki pasar kerja. Dengan demikian, program ini memiliki tujuan ganda, yaitu mengatasi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program pelatihan kerja ini sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek perencanaan, implementasi, maupun evaluasi. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara jenis pelatihan yang diselenggarakan dengan kebutuhan riil pasar kerja lokal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha lokal dan lembaga pendidikan atau pelatihan. Selain itu, keterbatasan kuota peserta pelatihan menjadi masalah lain yang menghambat upaya pemerintah dalam menjangkau kelompok sasaran secara lebih luas. Belum adanya sistem pendampingan dan penyaluran kerja yang terstruktur juga menjadi faktor penghambat yang signifikan, di mana banyak lulusan pelatihan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang relevan meskipun mereka telah menyelesaikan program pelatihan. Sebagai bagian dari kajian ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan program pelatihan kerja yang didanai melalui DBHCHT di Kabupaten Nganjuk, dengan fokus pada identifikasi tantangan, peluang, dan rekomendasi strategis untuk menganalisis implementasi program tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah, khususnya dalam memanfaatkan DBHCHT sebagai sumber daya strategis untuk mengatasi pengangguran. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi kasus, penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan pemahaman empiris yang lebih baik tentang bagaimana program pelatihan kerja dapat dirancang dan diimplementasikan secara lebih efektif guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena secara mendalam terkait pelaksanaan program pelatihan kerja yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Nganjuk. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevansinya dalam menggali perspektif dan pengalaman berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, instruktur pelatihan, dan peserta program. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dinamika kompleks yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pelatihan kerja secara holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan berdasarkan fakta yang telah diperoleh dengan cara observasi, wawancara, diskusi dengan cara tanya jawab berdasarkan kuesioner, dokumentasi, maupun triangulasi/gabungan yang berhubungan dengan fokus peneliti. Maka dilanjutkan dengan mendeskripsikan, membahas dan menganalisis data hasil penelitian sampai menghasilkan kesimpulan terkait Implementasi Program Pelatihan Kerja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Dalam Mengatasi Angka Pengangguran Di Kabupaten Nganjuk yang mengacu pada fokus penelitian menurut teori David C Korten dalam (Tarigan, 2020). Model yang dikembangkannya memiliki tiga fokus kritis yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Ke-tiga fokus indikator tersebut ialah (i) Program, (ii) Organisasi Pelaksana, (iii) Kelompok Sasaran. Dalam penelitian terkait Implementasi Program Pelatihan Kerja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Nganjuk. Berikut adalah pembahasan ketiga indikator tersebut berdasarkan hasil penelitian, serta kajian dari literatur terkait:

1. Program

Program adalah serangkaian desain kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat melalui pendekatan sistematis yang relevan, efisien, dan berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan oleh Korten dalam Tarigan (2020). Program yang ideal tidak hanya berfokus pada tujuan akhir, tetapi juga harus memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan masyarakat sasaran, efisiensi dalam pelaksanaannya, serta keberlanjutan yang memungkinkan manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012), keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan khusus dari masyarakat yang menjadi sasarannya. Program berbasis kebutuhan (*need-based approach*) dianggap lebih efektif dan berdampak signifikan karena mampu menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dalam masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Sebagai contoh, program pelatihan kerja yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Nganjuk dirancang khusus untuk menangani permasalahan tingginya angka pengangguran. Program ini menawarkan berbagai pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, seperti pelatihan memasak, menjahit, pengelasan, pelinting rokok, serta otomotif.

Pelatihan memasak dirancang untuk memberikan keahlian dalam bidang kuliner, baik bagi mereka yang ingin bekerja di industri makanan maupun yang ingin membuka usaha kuliner mandiri. Materi pelatihan mencakup teknik dasar memasak, penyajian makanan, hingga pengelolaan usaha kecil berbasis kuliner. Dalam pelatihan ini, peserta juga diajarkan inovasi menu sesuai dengan tren pasar untuk meningkatkan daya saing mereka.

Pelatihan menjahit memberikan keterampilan yang dapat diterapkan langsung dalam industri konveksi atau usaha rumahan. Peserta diajarkan mulai dari dasar pola jahit, teknik menjahit manual maupun menggunakan mesin, hingga produksi pakaian secara *massal* maupun *custom*. Program ini juga mencakup manajemen usaha kecil untuk mendukung peserta yang ingin membuka usaha konveksi secara mandiri.

Pelatihan pengelasan menawarkan kemampuan teknis yang dibutuhkan dalam sektor manufaktur dan konstruksi, seperti teknik pengelasan dasar, penggunaan alat berat, dan pemahaman keselamatan kerja. Peserta dipersiapkan agar mampu bekerja di proyek-proyek konstruksi maupun membuka usaha sendiri dalam bidang pengelasan.

Pelatihan pelinting rokok ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai di industri tembakau. Peserta dilatih menggunakan alat pelinting rokok modern serta diajarkan cara bekerja dengan efisien sesuai standar industri. Program ini dirancang untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di wilayah yang memiliki industri tembakau sebagai sektor utama.

Pelatihan otomotif berfokus pada peningkatan keterampilan teknis dalam perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor. Peserta mendapatkan pelatihan diagnostik, teknik perbaikan mesin, dan penggunaan peralatan canggih yang biasa digunakan di bengkel modern. Program ini diharapkan dapat menciptakan teknisi yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan pasar atau membuka usaha bengkel mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian, program ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan peserta di berbagai bidang tersebut. Namun, dampaknya masih terbatas karena jumlah peserta yang dapat dilibatkan belum mencukupi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, relevansi jenis pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja perlu terus ditingkatkan agar lebih selaras dengan dinamika kebutuhan di lapangan.

Dari hasil evaluasi, teridentifikasi bahwa dampak positif program dapat dioptimalkan melalui beberapa langkah strategis, antara lain memperluas kuota peserta pelatihan untuk mencakup lebih banyak masyarakat sasaran, meningkatkan relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja terkini, serta memperkuat pendampingan pasca-pelatihan, termasuk akses terhadap modal usaha dan informasi peluang kerja. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif ini, program diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih merata, berkelanjutan, dan mendukung pengentasan pengangguran secara signifikan.

2. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan *monitoring* program. Efisiensi, profesionalisme, serta kemampuan komunikasi organisasi pelaksana sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi pelaksana telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, mulai dari melakukan survei kebutuhan, menyediakan fasilitas pelatihan yang memadai, hingga memberikan bimbingan pasca-pelatihan, seperti informasi peluang kerja. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah instruktur dan kendala teknis pada beberapa pelatihan. Menurut Grindle, implementasi kebijakan sangat tergantung pada kapasitas organisasi pelaksana, termasuk kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya dan merespons kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pelatihan dan koordinasi yang baik di antara para pelaksana menjadi kunci keberhasilan. Berdasarkan temuan, efisiensi organisasi pelaksana cukup baik, tercermin dari survei kebutuhan yang akurat, fasilitas pelatihan memadai, dan bimbingan pasca-pelatihan seperti informasi peluang kerja. Namun, terdapat hambatan teknis, seperti keterbatasan jumlah instruktur dan minimnya pendampingan pasca-pelatihan, yang memengaruhi tingkat keberhasilan.

3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari program. Mereka harus sesuai dengan target program dan aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, kelompok sasaran meliputi masyarakat usia produktif, khususnya yang menganggur atau membutuhkan peningkatan keterampilan. Berdasarkan wawancara dengan peserta, mereka merasa bahwa pelatihan ini sangat membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha mandiri. Namun, beberapa peserta merasa kurang maksimal karena keterbatasan waktu pelatihan. Menurut Howlett dan Ramesh (1995), keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan partisipasi kelompok sasaran. Mereka menekankan bahwa program harus dirancang secara inklusif, sehingga tidak hanya mencakup kelompok tertentu, tetapi juga memberikan peluang kepada kelompok rentan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan fakta bahwa peserta

mengapresiasi program ini karena mampu meningkatkan peluang kerja mereka. Namun, keterbatasan waktu pelatihan menjadi salah satu hambatan, sebagaimana diungkapkan bahwa peserta yang merasa kurang maksimal memanfaatkan pelatihan ini.

Berdasarkan temuan penelitian dapat diketahui bahwa pada bagian program, dijelaskan pelatihan kerja DBHCHT memberikan dampak positif berupa peningkatan keterampilan peserta, tetapi dampaknya belum merata karena keterbatasan kuota dan relevansi pelatihan. Bagian organisasi pelaksana menyoroti keberhasilan mereka dalam menyediakan fasilitas dan bimbingan, namun kendala seperti minimnya pendampingan dan jumlah instruktur terbatas menjadi hambatan utama. Sementara itu, kelompok sasaran merasakan manfaat pelatihan, meskipun waktu pelatihan yang terbatas menyebabkan sebagian peserta merasa hasilnya kurang optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Pelatihan Kerja yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Nganjuk telah memberikan dampak positif dalam mengatasi pengangguran. Program ini berhasil meningkatkan keterampilan peserta melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti otomotif dan pelintingan rokok. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh kuota peserta, durasi pelatihan yang singkat, serta jenis pelatihan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas cakupan dan durasi pelatihan serta menyesuaikan materi dengan perkembangan pasar tenaga kerja.

Keberhasilan program juga ditentukan oleh kinerja organisasi pelaksana, yang sejauh ini telah menunjukkan hasil baik melalui survei kebutuhan masyarakat, fasilitas pelatihan yang memadai, dan bimbingan pasca-pelatihan. Kendati demikian, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti keterbatasan jumlah instruktur, pendampingan berkelanjutan, dan modernisasi alat pelatihan. Dengan meningkatkan sinergi antara desain program, efektivitas organisasi, dan keterlibatan peserta, program ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dalam pengentasan pengangguran di Kabupaten Nganjuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. (2023). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) guna Menunjang Pembangunan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(06), 1–23.
- Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*.

- Darmini. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR.
- Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. 1(1), 305.
- Grindle, M. S. (2017). Politics and Policy Implementation in the Third World (M. S. Grindle, Ed.). Princeton University Press.
- Hernita, E. (2021). CERDIK(Cegah Pernikahan Dini) (Poltekkes Kemenkes Banjarmasin (ed.)).
- Laduni, R. R. I., & Wibawani, S. (2023). Efektivitas Pelayanan Program Kartu Identitas Anak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Di Kelurahan Wonokromo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 13(2), 149–157. <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.4305>
- Novita, F. (2020). PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK. XIV(1), 50–63.
- Nur Rifa Aprilia, Herawati, A. R., & Dyah Hariani. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan anak Dari Tindak Kekerasan Di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Putra, F., Hasanah, D., & Nuriyah, E. (2018). Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah. *Share : Social Work Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13118>
- Sachlan, E. S. M. (2019). Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Sahputri, M., & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 176–190. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).7440](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).7440)
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Tarigan, V., & Tarigan, W. J. (2020). Analisis Budaya Organisasi dan Kebijakan Publik. *Jak Publik (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 2(1).
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*, 1993, 15.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- Wati, N. W. (2019). Implementasi Program Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Di Kota Bandar Lampung. 03(04), 1–9.
- Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). PT Buku Seru.
- Yuniastuti, Y. (2022). Dampak Sosial Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS, 2(1), 31–36. <https://doi.org/10.17977/um022v2i12017p031>